

BONUS DEMOGRAFI DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DI PROVINSI PAPUA

¹Willyam Msiren, ²Prpto Yuwono

^{1,2}Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana

Koresponden: ¹222013025@student.uksw.edu, ²pray.won@gmail.com

Keywords:

*Demographic bonus,
Industrial
development.*

Kata Kunci:

*Bonus demografi,
Pembangunan industri.*

ABSTRACT

Papua Province is one of 34 provinces in Indonesia, consisting of 29 districts/cities. The total population in 2018 was around 3,322,526 people. Based on BPS data for 2018, 68.99 percent of the Papuan population is productive age. The dependency rate is 44.96 percent, meaning that every hundred productive population must bear 44-45 people of unproductive age. This study provides an overview of the role of the demographic bonus in industrial development, with case studies on tofu, tempe, and smoked fish businesses.

ABSTRAK

Provinsi Papua merupakan salah satu dari 34 Provinsi di Indonesia, terdiri dari 29 kabupaten/kota. Jumlah penduduk pada tahun 2018 sekitar 3.322.526 jiwa. Berdasarkan data BPS tahun 2018, 68,99 persen penduduk Papua adalah penduduk usia produktif. Angka ketergantungan 44,96 persen, artinya setiap 100 orang penduduk produktif harus menanggung 44-45 jiwa usia tidak produktif. Studi ini memberikan gambaran tentang peran bonus demografi itu pada pembangunan industri, dengan studi kasus pada bisnis tahu, tempe dan ikan asar.

PENDAHULUAN

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Terdiri dari 29 kabupaten/kota, dengan luas wilayah 316.553,07 km², meliputi wilayah daratan dan wilayah perairan. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 3.322.526 jiwa (BPS Provinsi Papua, 2018). Dari jumlah tersebut, 2.292.099 jiwa berusia produktif (usia 15-64 tahun), atau 68,99 persen. Angka ketergantungan sebesar 44,96 persen, artinya bahwa setiap 100 orang penduduk produktif menanggung kurang lebih sekitar 44-45 penduduk usia nonproduktif (BPS Provinsi Papua, 2019).

Afandi (2017), Falikhah (2017) dan Sulistyastuti (2018) mendefinisikan bonus demografi adalah kelebihan penduduk usia produktif (yaitu yang berusia 15-64 tahun) dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif (yaitu penduduk usia 0-14 tahun ditambah usia 65 tahun ke atas). Yusmarni (2016) mengatakan bonus demografi merupakan perubahan struktur penduduk, yang di dalamnya ada perubahan dinamika penduduk berdasarkan umur, penurunan angka kelahiran (*fertility rate*), dibarengi dengan peningkatan angka kematian (*mortality rate*). Akibatnya angka harapan hidup meningkat, sehingga usia nonproduktif menjadi lebih sedikit, dibandingkan dengan usia produktif.

Dari studi empirisnya, Jati (2015) berpendapat bahwa ada dua kemungkinan yang terjadi dengan adanya bonus demografi. Bonus demografi dapat berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi, atau sebaliknya dapat berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika penduduk usia produktif dilibatkan dalam pembangunan sektoral secara berkesinambungan, melalui terbukanya lapangan pekerjaan baru. Sebaliknya bonus demografi dapat menjadi penghambat perekonomian, jika tingkat ketergantungan amat tinggi.

Faktor pertama yang perlu diperhatikan adalah pembinaan sumberdaya manusia. Afandi (2017), Mukri (2018) dan Sulastuti (2017) berpendapat bahwa bonus demografi dikatakan bermanfaat jika generasi muda yang disebut sebagai *intellectual capital* dapat dikembangkan seoptimal mungkin. Melalui proses pendidikan yang berkualitas akan mendapatkan keterampilan, serta mendapatkan akses kesehatan yang berkualitas, akan dapat berkontribusi terhadap produksi barang dan jasa.

Sebaliknya bonus demografi menciptakan bencana, demikian Mukri (2018), jika akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan rendah. Ditambah lagi dengan kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat menengah ke bawah, akan diikuti dengan meningkatnya kriminalitas. Akibatnya akan berdampak langsung pada produksi barang serta jasa dan akhirnya memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama dikemukakan Sulistyastuti (2018), ia melihat jumlah angka ketergantungan beberapa daerah yang masih tinggi, yang terjadi karena ketimpangan pendapatan yang tinggi, mengakibatkan sebagian besar penduduk mengalami kesulitan mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Selain itu juga dipersoalkan persebaran sumberdaya manusia yang berkualitas. Bonus demografi menjadi potensi jika persebaran penduduk di seluruh Indonesia merata. Sulastuti (2017) berdasarkan studi empirisnya menemukan bahwa persebaran usia produktif yang berkualitas yang tidak merata, akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan ekonomi yang memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Faktor lain yang perlu dicermati adalah peningkatan permintaan barang dan jasa. Falikhah (2017), Jati (2015) dan Sulastuti (2017) mengemukakan bahwa adanya bonus demografi akan memberikan potensi kesejahteraan yang sangat besar dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, jika pertambahan jumlah penduduk produktif akan berdampak kepada peningkatan permintaan barang serta jasa. Untuk memenuhi kenaikan permintaan itu, produksi barang serta jasa perlu ditingkatkan. Untuk itu perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus.

Gambaran tentang Papua menunjukkan hal yang kurang menguntungkan. Walau data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua pada tahun 2010-2017 meningkat sebesar 33-34 persen, akan tetapi kenaikan itu belum signifikan. Terbukti IPM Papua masih berada pada urutan terendah. Jati (2015) dan Putro (2016) menemukan tingkat buta huruf masih tinggi, rendahnya tingkat harapan hidup, buruknya pelayanan kesehatan dan masih banyak penduduk yang hidup di garis kemiskinan. Studi empiris Falikhah (2017), Maryati (2015) dan Sulastuti (2017) juga menemukan penurunan tingkat permintaan dan penawaran agregat, tingkat upah menurun, tingkat kesejahteraan menurun.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menggambarkan sejauh mana bonus demografi dapat memberi peluang untuk mengoptimalkan pembangunan Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Papua. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran sejauh mana bonus demografi dapat mengoptimalkan pembangunan Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Papua. Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Papua untuk menyusun kebijakan dalam pembangunan Sektor Industri Pengolahan.

Penelitian dipumpunkan pada Sektor Industri Pengolahan. Pertimbangannya adalah jika di Indonesia penyerapan tenaga kerja Sektor Industri Pengolahan menempati urutan ketiga setelah pertanian dan perdagangan, di Provinsi Papua penyerapan tenaga kerjanya rendah sekali. Jika Sektor Industri Pengolahan di Indonesia pada tahun 2018 menyerap 14,09 persen, di Papua hanya menyerap 2,07 persen saja. Ketertinggalan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Papua dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia, mendorong peneliti untuk melakukan studi kasus pada industri pengolahan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk penelitian analisis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi empiris. Aspers (2009) dan Biggerstaff & Thompson (2008) mengatakan bahwa pendekatan fenomenologi empiris berusaha memahami fakta yang terjadi berdasarkan gagasan informan tentang suatu konsep berdasarkan pemahamannya. Dalam penelitian ini akan dihimpun pemahaman informan tentang bonus demografi sebagai kesempatan untuk mengoptimalkan pembangunan Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Papua.

Peneliti memilih lokasi penelitian di dua tempat, yakni di Kota Jayapura dan di Kabupaten Biak Numfor. Adapun pertimbangannya adalah bahwa peneliti sudah mengetahui karakteristik informan beserta dengan industri pengolahan menurut skala usahanya. Di Jayapura akan melibatkan informan kunci dari dua instansi Pemerintah Daerah yang mengurus industri pengolahan. Sedangkan di Kabupaten Biak Numfor akan melibatkan informan pengusaha/pemilik industri pengolahan. Tujuan pemilihan informan dari pemerintah dan pelaku industri adalah untuk memperoleh sudut pandang yang berbeda dari sisi pemerintah dan dari sisi pelaku industri.

Seorang informan kunci dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, dari Sub Bidang Perindustrian dan Pariwisata. Informan kunci yang lain dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dari Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sedangkan tiga orang informan yang berasal dari pelaku industri pengolahan yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Seorang adalah pengusaha/pemilik usaha produksi tahu & tempe, serta dua orang pengusaha/ pemilik usaha ikan asar.

Tabel 1. Karakteristik Informan

| Informan | Nama | Lembaga / Bidang Usaha | Jabatan |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Yoel Wamafma | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua | Sub Bidang Perindustrian dan Pariwisata |
| 2 | Else Pakade | Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Papua | Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 4 | Nur Ahmmad | Usaha Produksi Tahu & Tempe | Pemilik/Pengusaha |
| 5 | Merry Maniani | Ikan Asar | Pemilik/Pengusaha |
| 6 | Juli Joe | Ikan Asar | Pemilik/Pengusaha |

Tahapan penelitian dan analisis memakai *Interpretative Phenomenology Analysis* (IPA) yang dikemukakan oleh Biggerstaff & Thompson (2008), sebagai berikut:

1. **Membuat Pertanyaan**
Peneliti membuat pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena bonus demografi sebagai kesempatan dalam mengoptimalkan pembangunan Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Papua berdasarkan teori.
2. **Melakukan Pra Studi**
Dalam tahapan pra studi, peneliti harus mengetahui dengan jelas keadaan di lapangan dengan berbagai cara, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, melakukan wawancara, serta observasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara online menggunakan aplikasi video call WhatsApp.
3. **Memilih Teori yang Tepat**
Peneliti memilih teori yang tepat agar dapat menjawab permasalahan penelitian dengan tepat dan terarah, penentuan teori berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sangat relevan dengan topik penelitian.
4. **Mempelajari Konstruksi Orde Pertama**
Peneliti membuat tema-tema kecil serta pemaknaannya berdasarkan studi empiris berdasarkan hasil jawaban informan.
5. **Membangun Konstruksi Tingkat Kedua**
Peneliti membuat tema-tema besar dengan menggabungkan makna tema-tema kecil yang diperoleh sebelumnya.
6. **Memeriksa Ketidaktepatan Analisis**
Peneliti memilah makna yang kurang tepat, dengan cara membandingkan makna teoretis yang diperoleh dari teori-teori yang dipelajari dalam kaitannya dengan bonus demografi.
7. **Menghubungkan dengan Literatur Ilmiah**
Membandingkan hasil penelitian dengan literatur ilmiah bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bonus Demografi di Papua

Bonus demografi adalah kelebihan penduduk usia produktif (yaitu yang berusia 15-64 tahun) dibandingkan dengan usia nonproduktif (yaitu yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun atau lebih). Bonus demografi diukur dengan menggunakan angka ketergantungan (*dependency ratio*), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk usia nonproduktif dengan jumlah usia produktif. Semakin kecil angkanya, berarti rendah angka ketergantungan, sebaliknya semakin besar bonus demografinya.

Jumlah penduduk Provinsi Papua pada tahun 2018 sebesar 3.322.526 jiwa. Dari jumlah tersebut yang berusia produktif sebesar 2.292.099 jiwa. Berarti jumlah penduduk berusia nonproduktif sebesar 1.030.427 jiwa. Berdasarkan data ini, maka angka ketergantungan sebesar

44,86 persen. Artinya 100 jiwa penduduk produktif harus menanggung 44-45 jiwa penduduk nonproduktif. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan angka ketergantungan di Indonesia, sebesar 48,23 persen. Dari angka itu menunjukkan bahwa bonus demografi di Provinsi Papua relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Data BPS tahun 2018 menunjukkan dari 2.292.099 jiwa penduduk usia produktif, baru 1.797.668 jiwa yang bekerja di berbagai lapangan usaha. Artinya masih ada yang belum bekerja (menganggur) sebanyak 494.431 jiwa. Dari jumlah 1.797.668 jiwa pekerja, industri pengolahan hanya menyerap sebesar 37.244 tenaga kerja, atau 2,07 persen saja. Hal ini menunjukkan betapa masih rendah peran industri pengolahan dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Papua.

Dari jumlah 494.431 jiwa yang belum bekerja, ada penduduk usia 15-24 tahun yang dikelompokkan pada usia kurang produktif. Kelompok usia ini kebanyakan belum menghasilkan pendapatan sendiri, karena mereka masih berstatus sekolah, baik itu sekolah menengah pertama (SMP) hingga perguruan tinggi. Jumlah penduduk usia kurang produktif itu berjumlah 313.225 jiwa. Berarti jumlah penduduk usia produktif yang menganggur sebanyak 181.026 jiwa, atau 7,9 persen dari jumlah penduduk usia produktif.

Masalah Pengolahan Kekayaan Alam

Di era perdagangan bebas yang semakin kuat menuntut daya saing tiap negara agar dapat berkompetisi dengan negara-negara lain dalam menciptakan perekonomian yang maju dan modern. Hal ini berdampak juga terhadap perekonomian tingkat daerah di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Papua. Di Provinsi Papua berkembang industri pengolahan, baik industri skala besar, industri skala sedang, maupun industri skala kecil dan mikro. Dari tiga jenis industri itu, sebagian besar adalah industri skala kecil dan mikro.

“Total industri pengolahan di Provinsi Papua, kurang lebih sekitar 3.275 unit. Industri skala kecil dan mikro (IKM), lebih spesifik yakni industri rumahan, totalnya kurang lebih sekitar 2.000 unit usaha, yang tersebar di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua.” (Informan 2)

Dari pemanfaatan sumberdaya di Provinsi Papua, beberapa industri yang berkembang diantaranya industri makanan, minuman; industri pengolahan tembakau; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki; industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur), barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; industri kertas dan barang dari kertas percetakan dan produksi media rekaman dan lain-lain.

Namun pemanfaatan kekayaan alam yang sangat melimpah itu belum secara penuh dikembangkan.

“Industri pengolahan merupakan sektor yang sangat berpotensi, namun belum secara penuh dioptimalkan. Industri kayu Papua masih memproduksi barang setengah jadi, dijual ke Makasar. Akibatnya nilai jualnya kecil”. (Informan 1)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor usaha yang sangat potensial di bumi Cendrawasih. Sebagai contoh jenis industri yang potensial adalah industri perikanan dan kelapa sawit berskala besar di Kabupaten Asmat, Merauke. Akan tetapi nilai tambah produknya dapat dikatakan rendah, karena dijual berupa barang setengah jadi berupa kayu batangan dan biji kelapa sawit.

Masalah Pembinaan Usaha

Pandangan pemerintah daerah menyikapi bonus demografi yang terjadi di Provinsi Papua adalah mendorong pembukaan lapangan usaha baru oleh swasta. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah melakukan pendampingan pada usaha baru yang dilakukan swasta.

“Kelebihan penduduk usia produktif di Provinsi Papua merupakan suatu beban bagi pemerintah, tetapi sementara ini telah ditanggulangi oleh pemerintah daerah.” (Informan 1)

“Pendampingan wiraswasta tujuannya agar dapat mandiri membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Papua, khususnya bagi penduduk usia produktif.” (Informan 2)

Dipihak lain pelaku industri memberi pendapat yang tidak sejalan dengan pernyataan dari informan kunci di atas.

“Dua tahun lalu sering ada kunjungan dari dinas perindustrian Kabupaten Biak Numfor, akan tetapi sekarang malah tidak ada kunjungan sama sekali dari dinas terkait.” (Informan 4)

Dari hasil wawancara ketiga informan di atas nampak ada dua kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, ada perbedaan pandangan antara pemerintah dan pelaku industri. Dari sudut pandang pemerintah, menganggap sudah melakukan pendampingan pada badan usaha. Namun dari pelaku industri mengatakan bahwa pendampingan yang dilakukan tidak berkesinambungan. Inilah permasalahan pokok lain yang dihadapi berkaitan dengan pengembangan industri pengolahan di Provinsi Papua. Kedua, nampaknya terdapat kurangnya sinkronisasi antara instansi di tingkat Provinsi dengan di tingkat kabupaten/kota menyangkut pendampingan terhadap pelaku industri pengolahan. Akibatnya industri yang dibuka di kabupaten/kota, tidak dapat berkembang dengan baik.

Masalah Penyerapan Tenaga Kerja

Pelaku industri mengemukakan argumentasi tentang rendahnya mengapa industri pengolahan menyerap tenaga kerja.

“Saya belum berani untuk mempekerjakan tenaga kerja produktif karena keuntungan per harinya tidak pasti. Selain itu tenaga kerja usia produktif belum berminat untuk di pekerjakan, karena mereka menganggap pekerjaan ini terlalu tradisional.” (Informan 3)

“Kelompok usia tersebut kebanyakan melihat bahwa usaha ikan asar merupakan kegiatan usaha yang masih tradisional, membuat mereka menganggap usaha tersebut tidak memiliki potensi yang menguntungkan.” (Informan 5)

“Sembilan tenaga kerja yang di pekerjakan semua berusia 30-50 tahun yang sudah memiliki keterampilan yang mumpuni.” (Informan 4)

Dari tiga pendapat itu, ada tiga alasan mengapa penyerapan tenaga kerja kelompok usia produktif itu rendah. Pertama, laba usaha tradisional yang masih rendah dan belum pasti. Akibatnya penyerapan tenaga kerja dibatasi jumlahnya. Kedua, usaha industri kurang diminati, karena persepsi kelompok usia produktif terhadap usaha industri tradisional yang kurang memiliki potensi yang menguntungkan. Ketiga, pihak pengusaha juga menuntut pekerja yang sudah memiliki keterampilan. Artinya kelompok usia produktif yang belum memiliki keterampilan akan sulit memperoleh pekerjaan. Akibatnya justru penduduk yang berusia lanjutlah yang paling banyak diserap oleh Sektor Industri Pengolahan, karena merekalah yang sudah memiliki keterampilan.

Sehubungan dengan penyerapan tenaga kerja lokal, berdasarkan informasi dari informan adalah sebagai berikut.

“Kebanyakan tenaga kerja yang di pekerjakan pada industri berasal dari luar Papua.” (Informan 4)

“Industri pengolahan belum secara penuh menyerap tenaga kerja, khususnya orang asli Papua, karena Papua belum memiliki industri pengolahan berskala besar, selain PT Freeport Indonesia.” (Informan 1)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa industri pengolahan belum secara penuh menyerap tenaga kerja lokal usia produktif. Ada dua hal yang dipandang sebagai penyebabnya. Pertama, bahwa penyerapan tenaga kerja lokal belum maksimal, karena kebanyakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan berasal dari luar Papua, khususnya sebagian besar berasal dari Jawa. Kedua, rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal dikaitkan dengan skala industri, yaitu dengan usaha besar. Nampaknya persepsi masyarakat lokal terhadap usaha tradisional yang berskala mikro dan kecil dianggap kurang mampu menyerap tenaga kerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melimpahnya tenaga kerja merupakan bonus demografi, yang di satu sisi berpotensi meningkatkan industri pengolahan dan terbukanya lapangan pekerjaan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan bencana, jika pertumbuhan penyerapan tenaga kerja ke industri pengolahan lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan tenaga kerja. Dari data penduduk usia produktif, jika dikurangi dengan jumlah penduduk usia sekolah, diperkirakan masih terdapat 7,9 persen dari jumlah penduduk usia produktif yang masih menganggur di Provinsi Papua.

Dari penyerapan tenaga kerja, industri pengolahan hanya menyerap 2,07 persen saja. Dari 12 jenis industri pengolahan yang berkembang di Provinsi Papua, tiga jenis industri yang mendominasi penyerapan tenaga kerja, yaitu industri makanan, industri barang dari kayu dan industri pertambangan bukan logam. Hal ini menunjukkan bahwa daya serap industri pengolahan pada bonus demografi masih amat rendah.

Ada beberapa faktor yang nampaknya perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja. Pertama, sumberdaya alam yang sangat potensial di Papua belum dikelola secara optimal. Penjualan hasil dari kekayaan alam Papua masih dalam bentuk bahan mentah atau barang setengah jadi, sehingga nilai tambahnya menjadi sangat rendah. Akibatnya pertumbuhan industri pengolahan menjadi kurang optimal, yang kemudian menghambat penyerapan tenaga kerja.

Kedua, industri pengolahan yang berkembang masih berupa industri tradisional yang dikelola pada skala kecil dan mikro. Akibatnya penyerapan tenaganya dibatasi oleh kemampuan mengembangkan usaha, minat tenaga kerja untuk terlibat dalam usaha tradisional ini, serta tuntutan keterampilan teknis yang membutuhkan pengalaman bekerja di usaha tersebut. Akibatnya penduduk yang berumur sajalah yang paling banyak diserap oleh Sektor Industri tradisional ini, karena merekalah yang sudah memiliki keterampilan.

Ketiga, industri pengolahan yang berkembang belum banyak menyerap tenaga kerja lokal, tetapi tenaga kerja dari luar Provinsi Papua. Hal ini diduga terjadi karena industri pengolahan yang berkembang kurang mendasarkan diri pada keterampilan teknis yang dimiliki penduduk lokal. Dengan keterampilan yang mereka miliki, mereka hanya mampu bekerja di industri tradisional. Nampaknya inilah akar pandangan masyarakat lokal bahwa industri tradisional dianggap kurang menguntungkan dibandingkan dengan industri lain yang berkembang di Provinsi Papua.

Keempat, konsistensi pemerintah Provinsi Papua dalam melakukan pembinaan industri pengolahan belum dilakukan secara sinambung. Pembinaan dilakukan secara sporadis, sehingga kurang terasa manfaatnya oleh pelaku industri. Kurangnya kesinambungan pembinaan industri

pengolahan itu nampaknya berkaitan dengan sinkronisasi pembinaan industri pengolahan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota yang masih kurang.

Saran

Bertolak dari kesimpulan diatas, agar pemanfaatan bonus demografi di Provinsi Papua dapat optimal, diperlukan kebijakan pemerintah untuk membangun industri pengolahan. Dari hasil penelitian ini, ada beberapa usulan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Provinsi Papua untuk pembangunan industri pengolahan.

Pertama, perlunya pembangunan industri pengolahan dalam rantai nilai pengolahan sumberdaya alam Papua, mulai dari bahan mentah, barang setengah jadi dan menjadi barang jadi. Pembangunan rantai nilai industri pengolahan itu diharapkan akan meningkatkan jumlah dan jenis industri pengolahan dan sekaligus dapat meningkatkan nilai tambah yang dapat dinikmati oleh masyarakat Papua.

Kedua, pembangunan rantai nilai industri pengolahan ini dapat mencakup berbagai skala industri, mulai dari industri skala kecil dan mikro, skala menengah, maupun skala besar. Pembangunan rantai nilai industri pengolahan diberbagai skala ini diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Ketiga, dalam rangka agar pembangunan rantai nilai industri pengolahan dapat menyerap tenaga kerja lokal, maka perlu pembinaan tenaga kerja lokal berkaitan dengan keterampilan teknis yang diperlukan oleh setiap rantai dari industri pengolahan itu. Dengan demikian penggunaan tenaga kerja dari luar daerah dapat ditekan dan penggunaan tenaga kerja lokal dapat ditingkatkan.

Keempat, dalam rangka pembinaan itu diperlukan konsistensi dan sinkronisasi antara pemerintah Provinsi Papua dengan pemerintah kabupaten/kota melalui dinas terkait. Konsistensi dan sinkronisasi demikian diperlukan agar pembinaan pada tenaga kerja maupun industri pengolahan dapat dilakukan secara sinambung.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, T. (2017). *Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan*. Retrieved from https://www.bappenas.go.id/files/9215/0397/6050/Siaran_Pers_-_Peer_Learning_and_Knowledge_Sharing_Workshop.pdf
- Aspers, P. (2009). Empirical Phenomenology: Qualitative Research Approach (The Cologne Seminars). *Indo-Pacific Journal of Phenomenology*, 9(2), 1–12. Retrieved from <http://www.scielo.org.za/pdf/ipjp/v9n2/02.pdf>
- Biggerstaff, D., & Thompson, A. R. (2008). Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): A Qualitative Methodology Of Choice In Healthcare Research. *Qualitative Research in Psychology*, 5(3), 214–224. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/14780880802314304>

- BPS Provinsi Papua. (2018). *Provinsi Papua Dalam Angka 2018* (1102001.94). Jayapura: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- BPS Provinsi Papua. (2019). *Indikator Penting Provinsi Papua* (94550.1713). Jayapura: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- Falikhah, N. (2017). Bonus Demografi Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 16(32). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v16i32.1992>
- Jati, W. R. (2015). Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang Atau Jendela Bencana Di Indonesia? *Populasi*, 23(1), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jp.8559>
- Maryati, S. (2015). Dinamika Pengangguran Terdidik: Tantangan Menuju Bonus Demografi Di Indonesia. *Economica*, 3(2), 124–136. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22202/economica.2015.v3.i2.249>
- Mukri, S. G. (2018). Menyongsong Bonus Demografi Indonesia. *'ADALAH : BULETIN HUKUM & KEADILAN*, 2(6). <https://doi.org/10.15408/adalah.v2i6.8223>
- Putro, K. H. (2016). Perencanaan Pembangunan Di Papua Dan Bonus Demografi 2020 (Development Planning in Papua and Demographic Bonus 2020). *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 49–69. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v2i1.37>
- Sulastuti, D. (2017). Membangun Generasi Berkualitas. *Media Keuangan Transparasi Informasi Kebijakan Fiskal*, XII(119), 5–54.
- Sulistyastuti, D. R. (2018). Tantangan Indonesia Untuk Mengoptimalkan Bonus. *Jurnal Studi Pemuda*, 6(1), 538. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.38012>
- Yusmarni. (2016). Analisis Bonus Demografi Sebagai Kesempatan Dalam Mengoptimalkan Pembangunan Pertanian Di Sumatera Barat. *Jurnal AGRISEP*, 15(1), 67–82. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.15.1.67-82>.